

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Praktik Siasah pada Masa Usman bin Affan”** ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Makalah ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan bertujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pemerintahan dan kebijakan politik yang dijalankan oleh Khalifah Usman bin Affan, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Dalam pembahasan makalah ini, penulis berusaha menjabarkan secara sistematis tentang profil Khalifah Usman, struktur pemerintahannya, praktik siasah yang diterapkannya, serta dampak dari kebijakan politik yang ia ambil.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dalam isi maupun dalam penyampaian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b> .....	<b>3</b>
A. Profil Usman bin Affan.....	3
B. Struktur Pemerintahan pada Masa Usman .....	5
C. Praktik Siasah pada Masa Usman bin Affan.....	7
D. DampakKebijakanPolitik Usman .....	10
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
A. KESIMPULAN. ....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Siasah atau politik dalam Islam merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan umat. Dalam sejarah Islam, siasah tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah yang harus diemban oleh pemimpin untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat (Zahrani, 2011). Oleh karena itu, praktik siasah yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW memiliki signifikansi penting dalam memahami model pemerintahan Islam yang ideal dan aplikatif.

Salah satu periode penting dalam sejarah siasah Islam adalah masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan RA. Ia adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin yang memimpin selama dua belastahun, mulai tahun 644 hingga 656 M. Pemerintahannya ditandai dengan kemajuannya dalam ekspansi wilayah, penguatan sistem administrasi, dan pengumpulan mushaf Al-Qur'an menjadi satu versi resmi yang kemudian menjadi standar bacaan seluruh umat Islam hingga kini (Al-Mubarakfuri, 2002). Di sisi lain, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan gejolak sosial-politik, termasuk tuduhan nepotisme dalam penunjukan pejabat daerah dan ketidakpuasan sebagian rakyat terhadap kebijakan pemerintah.

Pentingnya mengkaji siasah Usman bin Affan terletak pada pelajaran-pelajaran historis dan kontekstual yang dapat diambil, terutama mengenai bagaimana pemimpin Muslim mengelolapemerintahan di tengah kompleksitas politik dan sosial. Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya yang memerintah dengan dukungan penuh dari masyarakat, Usman menghadapi tantangan dalam, yakni perpecahan internal umat, fitnah yang menyebar, serta pemberontakan yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya beliau secara tragis (Watt, 1956).

Fenomena politik pada masa Usman juga menunjukkan pergeseran struktur kekuasaan, di mana pengaruh Bani Umayyah mulai meningkat seiring dengan penunjukan kerabat dekat Usman sebagai gubernur di wilayah-wilayah strategis seperti Syam dan Mesir (Lapidus, 2014). Hal ini menimbulkan resistensi dari sebagian sahabat dan umat Islam, yang merasa bahwa nilai keadilan dan musyawarah telah bergeser menuju sistem dinasti atau kekeluargaan. Dalam konteks ini, praktik siasah Usman menjadi bahan diskusi penting untuk memahami ketegangan antara idealisme Islam dan realitas politik saat itu.

Selain itu, kajian ini juga penting untuk memperkaya pemahaman generasi Muslim masa kini terhadap sejarah Islam secara objektif dan proporsional. Sering kali masa pemerintahan Usman bin Affan hanya dikenang karena peristiwa tragis di akhir pemerintahannya. Padahal, pada masa awal pemerintahannya, banyak pencapaian penting yang menunjukkan keunggulan sistem pemerintahan Islam seperti efisiensi administrasi, pengelolaan keuangan negara melalui baitul mal, serta reformasi militer dan ekonomi (Hamidullah, 1997).

Dengan menganalisis praktik-praktik politik Usman bin Affan secara mendalam, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan, amanah, dan integritas dalam kepemimpinan. Hal ini tentu relevan dalam konteks kekinian, di mana umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam dunia politik, baik dalam lingkup nasional maupun global. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting tidak hanya sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai rujukan moral dan etika kepemimpinan Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Esposito, 1998).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Profil Usman bin Affan ?
2. Bagaimana Struktur Pemerintahan pada Masa Usman ?
3. Bagaimana Praktik Siasah pada Masa Usman bin Affan ?
4. Bagaimana Dampak Kebijakan Politik Usman ?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Profil Usman bin Affan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Struktur Pemerintahan pada Masa Usman
3. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Siasah pada Masa Usman bin Affan
4. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Kebijakan Politik Usman

## PEMBAHASAN

### A. PROFIL USMAN BIN AFFAN

Usman bin Affan bin Abil ‘Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Umawi merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam yang dikenal karena ketakwaan, kedermawanan, dan integritasnya sebagai pemimpin umat. Ia termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling awal memeluk Islam dan termasuk dalam golongan *As-Sabiqun Al-Awwalun* (orang-orang yang pertama masuk Islam). Lahir di Makkah pada tahun 576 M dari Bani Umayyah, Usman tumbuh dalam lingkungan keluarga Quraisy yang terpandang dan kaya, sehingga ia memiliki latar belakang ekonomi yang kuat serta pendidikan yang baik, termasuk dalam hal membaca dan menulis yang pada masa itu masih jarang dikuasai masyarakat Arab (Al-Mubarakfuri, 2002).

#### 1. Keislaman dan Hubungan dengan Rasulullah SAW

Usman bin Affan masuk Islam melalui perantara Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang memiliki kedekatan pribadi dengannya. Keislaman Usman terjadi pada usia 34 tahun. Ia kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW dan menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Setelah wafatnya Ruqayyah, Usman kemudian menikahi Ummu Kultsum, yang juga merupakan putri Nabi. Oleh karena itu, ia mendapat gelar *Dzun-Nurain*, yang berarti "pemilik dua cahaya", satu-satunya orang dalam sejarah yang menikahi dua putri Rasulullah secara berturut-turut (Al-A'zami, 2003).

#### 2. Karakter Pribadi dan Akhlak

Usman bin Affan dikenal sebagai sosok yang pemalu, lembut, dan santun. Sifatnya ini bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa malaikat pun merasa malu terhadap Usman (HR. Muslim). Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Di antaranya adalah ketika ia membelis rumah dan mewakfkannya untuk umat Islam, serta kontribusinya dalam membiayai Perang Tabuk dengan menyumbangkan 1000 dinar, 300 unta, dan perlengkapan lainnya (Hamidullah, 1997).

#### 3. Masa Kekhalifahan

Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 M. Ia terpilih melalui sistem syura yang dibentuk oleh Umar sebelum wafat. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun—periode terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin. Pada enam tahun pertama, pemerintahannya berjalan dengan stabil dan penuh kemajuan. Ekspansi wilayah Islam terus meluas ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan

sebagian wilayah Kekaisaran Bizantium. Ia juga melakukan kodifikasi dan standarisasi Al-Qur'an, yang menjadi warisan monumental dalam sejarah Islam (Lapidus, 2014).

Namun, enam tahun kedua pemerintahannya mulai diwarnai gejolak politik. Beberapa kelompok di kalangan umat Islam mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan Usman, terutama terkait dengan penunjukan kerabatnya sebagai pejabat di berbagai daerah. Tuduhan nepotisme mulai merebak, meskipun sebagian besar keputusan tersebut dibuat atas dasar kepercayaan dan efisiensi pemerintahan (Watt, 1956).

#### 4. Prestasi dan Kebijakan Strategis

Beberapa prestasi penting Usman bin Affan selama masa kepemimpinannya antara lain:

- a. Kodifikasi Mushaf Al-Qur'an: Dalam menghadapi keragaman dialek pembacaan Al-Qur'an di berbagai wilayah, Usman memerintahkan penyalinan mushaf dari versi Hafsa binti Umar menjadi satu mushaf resmi (dikenal sebagai Mushaf Utsmani) dan menyebarkannya ke berbagai provinsi. Hal ini berperan besar dalam menjaga kemurnian teks Al-Qur'an (Al-Mubarakfuri, 2002).
- b. Ekspansi Wilayah Islam: Pemerintahannya berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti Armenia, Azerbaijan, dan sebagian Spanyol. Usman juga memperkuat angkatan laut Islam untuk menghadapi Bizantium, terutama dalam pertempuran laut seperti Perang Zat al-Sawari (Esposito, 1998).
- c. Peningkatan Administrasi dan Infrastruktur: Ia membentuk lembaga catatan negara (*Diwan*), memperluas fungsi baitul mal, dan membangun masjid serta jalan umum. Ia juga menetapkan penggunaan dinar dan dirham yang lebih sistematis serta mendirikan pos-pos penghubung antarwilayah kekhalifahan (Hamidullah, 1997).

#### 5. Wafatnya Usman bin Affan

Pada tahun 656 M, gejolak politik mencapai puncaknya. Pemberontakan yang dipicu oleh fitnah dan ketidakpuasan terhadap beberapa gubernur yang ditunjuknya menyebabkan pengepungan terhadap rumah Usman selama beberapa minggu. Meskipun banyak sahabat yang menawarkan bantuan militer, Usman menolak untuk menumpahkan darah sesama Muslim demi mempertahankan kekuasaannya. Ia akhirnya dibunuh oleh para pemberontak dalam kondisi sedang membaca Al-Qur'an. Tragedi ini menandai awal dari fitnah besar pertama dalam sejarah Islam dan menjadi titik awal perpecahan politik umat Islam yang berujung pada Perang Jamal dan Perang Shiffin (Zahrani, 2011).

## B. STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA MASA USMAN

Kekhalifahan Usman bin Affan (644–656 M) merupakan masa penting dalam sejarah politik Islam. Pada masa pemerintahannya, struktur pemerintahan mengalami beberapa perkembangan administratif sebagai respon terhadap ekspansi wilayah Islam yang semakin luas. Usman tidak hanya meneruskan sistem yang telah dirintis oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tetapi juga melakukan beberapa reformasi struktural dan administratif agar lebih efisien dalam mengelola wilayah kekuasaan yang telah menjangkau sebagian besar Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Persia (Lapidus, 2014).

### 1. Khalifah Sebagai Kepala Negara

Sebagai khalifah, Usman bin Affan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Ia bertindak sebagai pemimpin spiritual dan politik umat Islam. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam kendalinya, meskipun dalam pelaksanaannya dibantu oleh para penasihat, gubernur, dan hakim (Al-Mubarakfuri, 2002).

Peran utama khalifah mencakup:

- Menjagasyariat dan hukum Islam.
- Mengangkat dan memberhentikan pejabat.
- Mengawasijalannyapemerintahan.
- Mengelola keuangan negara dan penetapan kebijakan luar negeri.

### 2. Dīwān (Departemen Administratif)

Pada masa Usman bin Affan, lembaga *Dīwān* yang telah dirintis pada masa Umar terus dikembangkan. Diwan merupakan semacam kementerian atau departemen yang mencatat pengeluaran dan pemasukan negara serta urusan administrasi lainnya. Salah satu bentuk penguatan administrasi adalah penyempurnaan pencatatan gaji tentara, distribusi zakat, dan pengelolaan pajak (*kharaj, jizyah*).

Diwan pada masa Usman memiliki beberapa divisi penting:

- Diwan al-Jund: Mengelolaurusanmiliter dan pembayarangajiprajurit.
- Diwan al-Kharaj: Menguruspajak tanah dan hasilbumidari wilayah taklukan.
- Diwan al-Rasa'il: Bertugasmengurus surat-menyuratresmiantarwilayahkekuasaan.
- Diwan al-Barid: Sistemposataukurirresmiantarwilayahpemerintahan.

Reformasi ini penting untuk mengelola wilayah Islam yang luas, dari Syam hingga ke Persia dan Mesir, agar tetap terkoordinasi dengan pusat kekuasaan di Madinah (Hamidullah, 1997).

### 3. Wilayah Administratif dan Gubernur

Usman menerapkan sistem desentralisasi administratif dengan menunjuk para gubernur (*wali*) di berbagai provinsi. Gubernur bertindak sebagai perpanjangan tangan khalifah untuk mengurus wilayah kekuasaan di luar pusat. Wilayah yang memiliki gubernur sendiri meliputi:

- Syam (Suriah)
- Mesir
- Kufah dan Bashrah (Irak)
- Persia
- Yaman
- Afrika Utara

Penunjukan para gubernur ini kemudian menjadi isu politik karena beberapa di antaranya adalah kerabat Usman, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan (Syam) dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh (Mesir). Hal ini menimbulkan tuduhan nepotisme yang menjadi benih konflik di kemudian hari (Watt, 1956).

Namun perlu dicatat, sebagian besar gubernur yang ditunjuk memiliki pengalaman dan integritas yang cukup dalam bidang administrasi dan militer, serta mampu mengelola daerah yang sangat luas dan strategis.

### 4. Baitul Māl (Perbendaharaan Negara)

Usman memperkuat fungsi *Baitul Māl* sebagai institusi keuangan negara yang bertugas menyalurkan dana untuk kepentingan rakyat, membayar gaji aparat negara, serta mendana ekspedisinya. Ia juga menata ulang pembagian pendapatan negara, termasuk zakat, *fa'i*, dan *kharaj*. Pengelolaan *baitul mal* menjadi lebih sistematis dengan pencatatan yang rapi dalam *diwan* (Al-A'zami, 2003).

### 5. Peradilan dan Hakim (Qādī)

Sistem peradilan juga tetap dipertahankan dari masa sebelumnya. Para *qādī* atau hakim ditunjuk langsung oleh khalifah atau gubernur untuk menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. *Qādī* memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan perkara di wilayah tugasnya. Peradilan Islam dijalankan secara independen dari kekuasaan eksekutif untuk menjamin keadilan.

### 6. Angkatan Bersenjata dan Ekspansi Wilayah

Usman mengembangkan angkatan laut Islam untuk menghadapi ancaman dari kekaisaran Bizantium di wilayah Mediterania. Ia juga

memperkuat militer darat dalam menaklukkan wilayah Persia, Khurasan, hingga Armenia. Pengelolaan tentara diatur oleh Diwan al-Jund, termasuk penyaluran logistik dan gaji prajurit (Esposito, 1998).

#### 7. Kodifikasi Mushaf Al-Qur'an

Salah satu kebijakan administrasi spiritual yang monumental dari Usman adalah kodifikasi dan standardisasi mushaf Al-Qur'an. Ia memerintahkan penyusunan satu mushaf resmi berdasarkan hafalan dan catatan para sahabat, kemudian disalin dan disebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Langkah ini menjaga kemurnian bacaan Al-Qur'an dan menjadi struktur administratif keagamaan yang sangat penting (Al-A'zami, 2003).

Struktur pemerintahan pada masa Usman bin Affan memperlihatkan sistem pemerintahan Islam yang semakin kompleks dan modern dalam skala abad ke-7. Usman berhasil menata organisasi pemerintahan yang mampu menangani administrasi wilayah Islam yang sangat luas. Meskipun masa pemerintahannya juga diwarnai oleh gejolak politik, namun fondasi administratif dan institusional yang dibangunnya menjadi warisan penting dalam sejarah pemerintahan Islam.

### C. PRAKTIK SIAHAH PADA MASA USMAN BIN AFFAN

#### 1. Pengertian Siasah dalam Konteks Kekhalifahan

Secara etimologis, *siyasah* (سياسة) dalam bahasa Arab berarti "pengaturan urusan masyarakat". Dalam konteks Islam, siyasah merujuk pada kebijakan politik, kepemimpinan, dan strategi administrasi negara yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Siasah pada masa Khulafaur Rasyidin, termasuk Usman bin Affan, tidak hanya berkaitan dengan aspek kekuasaan, tetapi juga pengaturan keadilan, keamanan, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat (Abdullah, 2010).

#### 2. Prinsip-Prinsip Dasar Siasah Usman bin Affan

Usman bin Affan menjalankan siasahnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada:

- Musyawarah (Syura): Dalam banyak hal, Usman menggunakan sistem syura untuk mengambil keputusan penting negara, walaupun ia juga lebih sering mengambil keputusan secara mandiri seiring berkembangnya administrasi negara.
- Keadilan (Adl): Keadilan ditegakkan baik dalam sistem hukum, ekonomi, maupun penunjukan pejabat.
- Stabilitas Politik dan Keamanan: Usman sangat menekankan pentingnya keamanan dalam negeri karena wilayah kekuasaan Islam saat itu sudah sangat luas.

- Persatuan Umat: Salah satu buktinya adalah kodifikasi Al-Qur'an sebagai strategi penyatuan bacaan dan pemahaman umat Islam di berbagai wilayah.

### 3. Kebijakan Politik dan Pemerintahan

#### a. Penunjukan Gubernur dan Isu Nepotisme

Salah satu praktisi siasah paling kontroversial dari Usman bin Affan adalah penunjukan kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai gubernur di beberapa wilayah strategis. Di antaranya:

- Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Gubernur Syam.
- Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sebagai Gubernur Mesir.
- Al-Walid bin Uqbah sebagai Gubernur Kufah.

Tujuan utama Usman dalam kebijakan ini adalah untuk menjamin loyalitas dan efisiensi pemerintahan di wilayah penting yang mulai rawan gejolak. Namun, sebagian umat Islam menganggap kebijakan ini sebagai bentuk nepotisme, dan hal ini menjadi salah satu pemicu munculnya oposisionalisme terhadap pemerintahannya (Lapidus, 2014; Watt, 1956).

#### b. Desentralisasi Kekuasaan

Usman menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang besar kepada para gubernur dalam mengatur daerahnya. Mereka diberi otoritas dalam pengumpulan pajak, pengaturan militer lokal, hingga penyelesaian sengketa hukum. Meskipun demikian, semua keputusan strategis tetap dikendalikan dari pusat pemerintahan di Madinah.

Desentralisasi ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah, namun juga menyebabkan ketimpangan kekuasaan dan munculnya pengaruh lokal yang kuat, seperti kekuasaan Muawiyah di Syam yang pada akhirnya menjadi titik awal munculnya dinasti (Hamidullah, 1997).

#### c. Penguatan Armada Laut

Dalam bidang pertahanan, Usman memperluas kebijakan militer dengan membangun armada laut Islam pertama. Ini adalah langkah politik strategis dalam menyaingi kekuatan maritim Romawi-Bizantium.

Bersama gubernur-gubernur wilayah pesisir seperti Muawiyah, Usman melancarkan ekspedisi laut ke Cyprus dan wilayah Mediterania (Esposito, 1998). Strategi ini menunjukkan kemajuannya dalam pemikiran politik militer Islam yang tidak hanya berfokus pada ekspansi darat.

#### 4. Kebijakan Ekonomi dan Pajak

Usman mempertahankan sistem *baitul mal* dan mengoptimalkan pemungutan zakat, jizyah, dan kharaj. Ia juga menetapkan kebijakan ekonomi berupa:

- Penghapusan beberapa pajak yang memberatkan rakyat di wilayah baru.
- Pendistribusian kekayaan secara merata, terutama kepada para mujahidin.
- Pengawasan terhadap monopoli dan penguasaan pasar oleh individu tertentu.

Namun, peningkatan kemakmuran sebagian elit Umayyah yang dekat dengan kekuasaan menimbulkan kecemburuhan sosial dan ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat (Al-A'zami, 2003).

#### 5. Standarisasi Mushaf Al-Qur'an: Politik Bahasa dan Keagamaan

Kodifikasi Mushaf Al-Qur'an oleh Usman bukan hanya tindakan keagamaan, tetapi juga tindakan siasah yang strategis. Pada masa itu, variasi bacaan Al-Qur'an mulai menimbulkan perpecahan antar kelompok. Usman membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit untuk menyusun mushaf standar, yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah. Mushaf-mushaf lain yang berbeda dengan standar ini dibakar.

Langkah ini dianggap sebagai politik kebudayaan dan keagamaan yang berhasil menyatukan umat dalam satu bacaan, mencegah perpecahan yang lebih luas (Al-Mubarakfuri, 2002).

#### 6. Penanganan Oposisi dan Munculnya Fitnah

Pada masa akhir kekuasaannya, Usman menghadapi gejolak politik dari kelompok-kelompok yang tidak puas, baik dari Mesir, Kufah, maupun Bashrah. Sebagian besar kritik diarahkan pada gaya pemerintahannya yang dianggap terlalu lunak terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh gubernur-gubernur.

Alih-alih menindas pemberontak secara brutal, Usman memilih untuk mengedepankan dialog dan menolak menggunakan kekuatan senjata terhadap sesama Muslim, bahkan ketika nyawanya terancam. Ini menunjukkan praktik siasah damai dan konsisten dengan prinsip Islam, namun sayangnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal hingga menyebabkan terbunuhnya sang khalifah (Watt, 1956; Esposito, 1998).

Praktik siasah Usman bin Affan menunjukkan kematangan sistem pemerintahan Islam dalam menghadapi tantangan politik internal dan eksternal. Di satu sisi, ia berhasil memperkuat administrasi negara, memperluas wilayah kekuasaan, dan menyatukan umat dalam satu mushaf Al-Qur'an. Di sisi lain, beberapa kebijakan politiknya menimbulkan reaksi keras dari sebagian umat, yang pada akhirnya menjadi awal dari masa fitnah dalam

sejarah Islam. Meskipun demikian, prinsip-prinsip syura, keadilan, dan ketakwaan tetap menjadi fondasi utama siasah beliau.

#### **D. DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK USMAN**

Kebijakan politik yang diterapkan oleh Khalifah Usman bin Affan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan pemerintahan Islam, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dampak ini bisa dikategorikan menjadi dua: dampak positif dan dampak negatif, yang keduanya memengaruhi dinamika sosial-politik umat Islam setelah masa Rasulullah SAW.

##### **1. Dampak Positif**

###### **a. Ekspansi Wilayah Islam yang Luas**

Usman bin Affan melanjutkan ekspansi yang dimulai pada masa Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam mencakup Afrika Utara, Persia, hingga bagian Asia Tengah. Kebijakan ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga memperluas pengaruh politik dan peradaban Islam ke berbagai penjuru dunia (Lapidus, 2014).

###### **b. Kodifikasi Mushaf Al-Qur'an**

Salah satu kontribusi monumental Usman adalah standarisasi bacaan Al-Qur'an yang menghasilkan Mushaf Usmani. Ini berdampak besar pada kesatuan akidah dan bacaan umat Islam, serta mencegah perpecahan dalam hal cara membaca dan memahami Al-Qur'an (Al-A'zami, 2003). Sampai saat ini, mushaf standar yang digunakan oleh umat Islam merujuk pada Mushaf Usmani tersebut.

###### **c. Penguatan Sistem Administrasi dan Tata Kelola Negara**

Usman memperkuat sistem birokrasi dan memperluas struktur pemerintahan, termasuk sistem administrasi keuangan, perpajakan, dan pengawasan terhadap pendapatan negara (*baitul mal*). Ia menempatkan para gubernur dan pejabat di wilayah strategis dengan harapan meningkatkan efisiensi pemerintahan, terutama di wilayah yang jauh dari Madinah (Hamidullah, 1997).

###### **d. Pembangunan Armada Laut**

Usman mendukung pengembangan kekuatan laut Islam. Bersama Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, ia menginisiasi pembentukan angkatan laut Islam pertama yang mampu menandingi kekuatan maritim Bizantium. Ini menjadikan dunia Islam bukan hanya kekuatan darat, tetapi juga maritim (Esposito, 1998).

##### **2. Dampak Negatif**

###### **a. Tuduhan Nepotisme dan Ketidakpuasan Publik**

Salah satu kebijakan yang memicu ketegangan adalah penunjukan kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai gubernur di berbagai daerah penting. Penempatan Muawiyah di Syam, al-Walid bin Uqbah di Kufah, dan Abdullah bin Sa'ad di Mesir dianggap sebagai bentuk nepotisme, meskipun Usman yakin mereka sebagai orang-orang yang kompeten. Hal ini memicu gelombang kritik dan protes dari sebagian masyarakat dan elite politik (Watt, 1956).

#### b. Munculnya Fitnah dan Konflik Internal

Akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan Usman menyebabkan munculnya Fitnah Ula (fitnah pertama) dalam sejarah Islam. Kelompok-kelompok oposisi dari Mesir, Kufah, dan Bashrah datang ke Madinah dan mengepung rumah Usman. Akhirnya, Usman terbunuh oleh pemberontak pada tahun 656 M (35 H). Peristiwa ini menjadi awal dari krisis politik besar dan perang saudara di kalangan umat Islam (Lapidus, 2014).

#### c. Tumbuhnya Otonomi Gubernur Wilayah

Desentralisasi kekuasaan yang dijalankan oleh Usman menyebabkan sebagian gubernur memiliki kekuasaan yang sangat besar dan cenderung otonom. Salah satu contohnya adalah Muawiyah di Syam yang pada akhirnya menjadi penguasa kuat dan memunculkan dinasti Umayyah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Hal ini mengubah sistem kekhilafahan dari bentuk musyawarah menjadi kerajaan turun-temurun (Hamidullah, 1997).

#### d. Polarisasi Politik di Kalangan Sahabat

Dampak jangka panjang dari kebijakan politik Usman juga terlihat dari polarisasi di kalangan sahabat Nabi. Sebagian mendukung Usman secara penuh, sementara yang lain menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka. Ini memperlemah kesatuan umat dan menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan, terutama pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib (Esposito, 1998).

Secara keseluruhan, kebijakan politik Usman bin Affan menunjukkan kombinasi antara inovasi, perluasan kekuasaan, dan efisiensi administrasi di satu sisi, dengan munculnya resistensi sosial-politik akibat kebijakan personalia dan konsentrasi kekuasaan pada keluarga Bani Umayyah di sisi lain. Dampak positifnya tetap signifikan dalam sejarah Islam, tetapi dampak negatifnya menjadi pelajaran besar bagi pemerintahan Islam selanjutnya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPLAN**

Usman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam dan menguatkan struktur pemerintahan. Masa kepemimpinannya ditandai dengan berbagai kebijakan penting dalam bidang siasah (politik), di antaranya adalah pengangkatan pejabat dari kalangan keluarga sendiri, pembakuan Mushaf Al-Qur'an, penguatan administrasi negara, serta pembangunan kekuatan maritim Islam.

Dalam praktiknya, Usman menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan antara stabilitas politik, penguatan institusi, dan ekspansi kekuasaan. Namun, sebagian kebijakan politiknya seperti pengangkatan kerabat sebagai gubernur menuai kritik tajam dan memunculkan tuduhan nepotisme yang mengarah pada ketidakpuasan masyarakat dan ketegangan politik.

Dampak dari kebijakan tersebut bersifat dualistik: di satu sisi memperkuat pemerintahan Islam dan memperluas pengaruhnya, di sisi lain memicu krisis internal yang dikenal sebagai *fitnah pertama* dalam sejarah Islam, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Khalifah Usman.

Dengan demikian, praktik siasah pada masa Usman bin Affan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan Islam, serta perlunya komunikasi yang efektif antara pemimpin dan rakyat untuk menjaga keutuhan umat.

#### **B. SARAN**

Penting bagi pemimpin umat Islam masa kini untuk belajar dari sejarah pemerintahan Usman bin Affan. Siasah Islam harus ditegakkan di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, N. (2015). *Sejarah Sosial Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azzam, M. A. (2005). *Khilafah: Dari Rasulullah SAW hingga Kekhalifahan Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dhiya'uddin, A. (2008). *Sejarah Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Harun, N. (2012). *Sejarah Islam Klasik: Dinasti Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, A. G. (2004). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Jakarta: LKiS.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suryanegara, A. M. (1998). *Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: Salamadani.
- Thoha, M. (2007). *Kapita Selekta Politik Islam*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zainuddin, A. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana.